

# **Diplomasi Publik dan Media: Penggunaan Jaringan Penyiaran Al-Jazeera dalam Krisis Diplomatik Qatar 2017-2019**

*JISPO*  
*Jurnal Ilmu Sosial dan*  
*Ilmu Politik*  
2020, Vol. 10, No. 2: 141-168  
[https://journal.uinsgd.ac.id/  
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)  
© The Author(s) 2020

**Salsabila Arini Kusuma\***

Universitas Padjadjaran, Indonesia

**Chandra Purnama**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

**Wawan Budi Darmawan**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

## **Abstrak**

Krisis diplomatik Qatar terjadi ketika Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 2017. Qatar dituduh mendukung terorisme seiring kedekatannya dengan Iran dan organisasi-organisasi teroris di Timur Tengah. Krisis diplomatik itu diikuti pula dengan perang media antara kedua belah pihak. Empat negara tersebut melakukan berbagai propaganda untuk memenangkan opini publik internasional selama berlangsungnya krisis. Qatar yang terancam posisi strategisnya kemudian menggunakan pendekatan diplomasi publik sebagai upaya melawan propaganda tersebut. Artikel ini membahas diplomasi publik Qatar melalui jaringan Al-Jazeera dalam menghadapi krisis diplomatik di Timur Tengah tahun 2017-2019 dengan menggunakan konsep “Tiga Dimensi Diplomasi Publik” dari Joseph S. Nye, yang kemudian dikembangkan oleh Mark Leonard, sebagai kerangka teoritiknya. Pengumpulan data dilakukan melalui investigasi media online dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qatar melalui Al-Jazeera melakukan tiga dimensi diplomatik terkait krisis diplomatiknya dengan empat negara Arab, yakni komunikasi rutin, strategis dan jangka panjang.

## **Kata-kata Kunci**

Al-Jazeera, krisis diplomatik, penyiaran internasional, diplomasi publik, Qatar

---

\* Penulis untuk korespondensi:

Salsabila Arini Kusuma

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: [salsabila16018@mail.unpad.ac.id](mailto:salsabila16018@mail.unpad.ac.id)

**Abstract**

*Qatar's diplomatic crisis broke out when Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt, known as the Arab Quartet, cut their diplomatic ties with Qatar in 2017. The Arab Quartet alleged Qatar of being a supporter of terrorism due to its proximity to Iran and certain terrorist organizations. The termination of diplomatic relations happened along with a media war between the two parties. The four countries carried out propaganda to win international public opinion during the crisis. Qatar, which was threatened, used public diplomacy as a counter-attack. This article employs the concept of three dimensions of public diplomacy by Joseph S. Nye, which was later developed by Mark Leonard, as a theoretical framework. Required data were collected through online media investigation and interviews. Research findings show that all three dimensions of public diplomacy were found in Qatari public diplomacy enforcement through Al-Jazeera related to its diplomatic crisis with the Arab Quartet, namely routine, strategic and long term communication.*

**Key Words**

*Al-Jazeera, diplomatic crisis, international broadcasting, public diplomacy, Qatar*

**Pendahuluan**

Timur Tengah merupakan salah satu episentrum ekonomi-politik global yang identik dengan konflik antar negara di Kawasan ini (Sulaeman 2017:5). Urusan keamanan dan politik di Timur Tengah pun menjadi kompleks. Hal ini ditandai dengan perebutan kekuasaan dan dinamika yang cepat sehingga pola kawan dan lawan di antara negara-negara yang terlibat relatif tidak stabil (Stephens 2019). Setelah berbagai konflik yang terjadi sejak tahun 1990-an, kemunculan krisis diplomatik Qatar yang dimulai pada 5 Juni 2017 menjadi babak baru dalam konflik di Timur Tengah.

Krisis diplomatik Qatar ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik yang diinisiasi oleh Arab Saudi, lalu diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir yang disebut sebagai Arab Quartet. Krisis ini disebabkan oleh serangkaian aktivitas Qatar yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan ini terutama didasarkan pada kedekatan Qatar dengan Iran dan kelompok ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin,

ISIL, Al-Qaeda dan Hamas yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Hal ini kemudian mendorong negara-negara di Timur Tengah untuk memerangi semua negara yang bersekutu dengan kelompok ekstremis tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik tersebut disertai pula dengan blokade batas wilayah Qatar. Hal ini membuat satu-satunya perbatasan darat Qatar menjadi tertutup dengan pembatasan jalur laut dan udara yang terbuka untuk lalu lintas transportasi menuju Qatar. Blokade tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan ketersediaan stok pangan di Qatar. Hal ini dikarenakan 40% distribusi pangan melewati jalur darat dari Arab Saudi (“Qatar Crisis: What You Need to Know”). Arab Quartet secara teguh memegang keputusan untuk memboikot Qatar. Mereka hanya bersedia membangun kembali hubungan diplomatik dengan Qatar apabila Qatar melaksanakan tiga belas ultimatum yang telah dilayangkan melalui mediator negara Kuwait pada 6 Juni 2017.

Namun, Qatar menganggap tidak ada dasar yang sah atas keputusan negara Arab Quartet tersebut. Ultimatum yang dilayangkan dianggap melanggar kedaulatan Qatar sebagai negara merdeka sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakannya ultimatum tersebut, Arab Quartet kemudian berupaya menekan Qatar melalui propaganda anti-Qatar (Wood 2018). Propaganda ini terlihat dengan munculnya situs dan akun di media sosial yang menyampaikan pesan kepentingan aliansi Arab Saudi untuk menjatuhkan Qatar. Situs dan akun Twitter *The Qatar Insider*, misalnya, menampilkan berita dengan narasi bahwa Qatar mendukung aktivitas terorisme di berbagai belahan dunia dengan menggunakan infografis yang menarik sehingga akun ini dengan cepat mendapat perhatian publik.

Propaganda anti-Qatar ini terus berlanjut memasuki tahun kedua krisis diplomatik tahun 2018. Aliansi Arab Saudi terus meluncurkan berbagai manuver untuk melanggengkan kemenangannya dalam opini publik, terutama di negara mitra strategis Qatar. Hal ini, misalnya, ditunjukkan melalui organisasi The Saudi American Public Relation Affairs Committee (SAPRAC), sebuah organisasi lobi Saudi yang dikabarkan menyumbang \$2,6 juta pada tahun 2017 kepada Podesta, kelompok lobby Washington. Sumbangan itu diberikan terkait layanan urusan publik untuk menjalankan situs dan akun media sosial dalam rangka kampanye anti-Qatar di Amerika Serikat (Dozier 2017). Selain melalui media sosial, Arab Quartet juga menggalang opini publik melawan Qatar melalui berbagai konferensi internasional. Misalnya, konferensi yang diselenggarakan oleh TRENDS Research & Advisory

Centre di Paris, yang menampilkan pembicara tokoh-tokoh anti-Qatar seperti Ahmed Al Hamli dan jurnalis Prancis, Christian Makarian.

Propaganda tersebut memicu aksi demonstrasi anti-Qatar di beberapa kota seperti di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Terjadi juga aksi demonstrasi di Zurich yang menuntut penggantian Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa propaganda anti-Qatar tersebut semakin mengancam posisi strategis Qatar yang sudah lama dibangun sehingga dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Qatar di mata publik internasional yang dilakukan melalui narasi terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan.

Di tengah situasi krisis tersebut, Qatar berupaya melakukan manajemen krisis dan dampaknya baik dari sisi politik dan ekonomi maupun dukungan opini publik (Al-Muftah 2019). Hal ini dilakukan dalam rangka melawan mispersepsi publik melalui diplomasi publik, sebuah aktivitas komunikasi pemerintah suatu negara dengan publik asing dalam melawan propaganda dan membalikkan keadaan agar dapat ‘memenangkan’ krisis. Pelaksanaan diplomasi publik tersebut disesuaikan dengan keadaan sehingga dapat membantu melawan propaganda dan meningkatkan reputasi yang terancam akibat propaganda.

Salah satu upaya diplomasi publik tersebut adalah penggunaan jaringan penyiaran berita internasional (Cherkaoui 2018). Qatar memiliki kapabilitas melakukan diplomasi publik dengan menggunakan saluran berita Al-Jazeera, sebuah penyiaran internasional yang didirikan oleh pemimpin Qatar pada tahun 1996. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan kekuatan dalam mendukung eksistensi Qatar di tingkat regional maupun global (Antwi-Boateng 2013). Al-Jazeera dijadikan instrumen untuk menyampaikan perlawanan Qatar terhadap propaganda internasional. Ia merupakan satu-satunya media Arab yang memiliki kredibilitas dan jangkauan audiens yang luas seperti CNN.

Artikel ini berupaya menggambarkan upaya diplomasi publik Qatar tersebut melalui saluran berita Al-Jazeera kepada publik internasional terkait dengan krisis diplomatik Qatar. Untuk tujuan ini, artikel ini menggunakan konsep “tiga dimensi diplomasi publik” dari Joseph Nye (2008) dan Mark Leonard, *et al* (2002), yaitu komunikasi rutin sehari-hari, komunikasi strategis dan komunikasi jangka-panjang. Konsep diplomasi publik ini diharapkan dapat menyentuh konteks keseluruhan dalam aktivitas diplomasi publik Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik yang dihadapinya.

## Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan proses komunikasi pemerintah suatu negara kepada publik asing di mana dalam proses komunikasi tersebut pemerintah mencoba menjelaskan ide, cita-cita, budaya, kepentingan dan kebijakan nasional negaranya. Konsep diplomasi publik mulai menjadi perhatian karena keberhasilannya saat Perang Dingin. Konsep ini dikembangkan oleh Joseph Nye (2008) dalam artikelnya “Soft Power and Public Diplomacy”. Diplomasi publik saat itu digunakan oleh negara Uni Soviet dan Amerika Serikat demi kepentingan nasional untuk melawan propaganda terkait dukungan keseimbangan senjata nuklir dan perang ideologi. Penggunaan diplomasi publik di masa Perang Dingin tersebut telah menginspirasi banyak kajian tentang instrumen yang dapat digunakan oleh negara lain dalam mencapai tujuan internasional.

Dalam upaya mencapai tujuan diplomasi publik, Joseph Nye mengembangkan tiga dimensi komunikasi, yakni komunikasi rutin, komunikasi strategis dan komunikasi jangka panjang (Leonard, *et al* 2002:11; Nye 2008:107). Pertama, dimensi komunikasi rutin yang merupakan aktivitas pemerintah yang berkuasa dalam menyampaikan berita sesuai dengan kepentingan nasional negaranya (Leonard, *et al* 2002:12-13). Kepentingan nasional merupakan tujuan dan ambisi negara baik ekonomi dan militer maupun budaya. Dimensi ini mencakup pemberitaan harian yang disesuaikan dengan agenda tujuan dan ambisi negara. Ia diharapkan memiliki kemampuan sikap reaktif untuk merepresentasikan negara dalam hitungan jam atau hari ketika ada suatu peristiwa yang menyangkut negara tersebut. Dimensi ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin ditimbulkan atau membalikkan keadaan dengan memanfaatkan kejadian tersebut untuk pencapaian kepentingan negara yang bersangkutan.

Pada saat memutuskan atau merespons suatu peristiwa dengan kebijakan, baik yang bersifat domestik maupun asing, pemerintahan negara tersebut umumnya akan memberikan penjelasan dan pemahaman dari sudut pandang negaranya mengapa hal tersebut dilakukan (Nye 2008:101). Karena itu, dimensi komunikasi rutin ini berkaitan dengan upaya pengenalan dan penggambaran nilai dalam kebijakan sebuah negara kepada publik internasional untuk menjadikan negara sebagai sosok penting dalam peristiwa, memperbarui reputasi mereka atau membalikkan mispersepsi tentang mereka.

Kedua, dimensi komunikasi strategis yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk rangkaian pesan dan aktivitas strategis berbentuk kampanye dengan tema, nilai dan budaya suatu negara tertentu yang

dilakukan dalam hitungan pekan hingga bulan. Dimensi ini bertujuan untuk membuat publik memahami suatu isu dari perspektif pemerintah dan menciptakan persepsi publik internasional yang positif mengenai pemerintah dalam bidang politik, perdagangan, pariwisata, investasi dan budaya (Leonard, *et al* 2002). Karena itu, reputasi pariwisata, keamanan, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi penting bagi negara dalam membangun hubungan strategis internasional.

Ketiga, dimensi komunikasi jangka panjang yang dilakukan melalui pertukaran pelajar, konferensi, beasiswa dan memberikan akses kepada media untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan publik internasional melalui pembentukan kontak dan jaringan komunikasi di antara sesama media, aktor non-pemerintah, akademisi dan lain-lain. Pelaksanaan diplomasi publik tersebut ditargetkan pada individu dengan membangun kepercayaan dari kedua belah pihak, tidak hanya dari negara pengirim, dengan bertukar gagasan dan pengalaman, sehingga pada akhirnya mengembangkan pemahaman mendalam tentang suatu negara (Nye 2008:109).

Selain dimensi komunikasi publik, penting juga dijelaskan tentang penyiaran internasional. Penyiaran internasional dapat didefinisikan sebagai penyiaran lintas batas untuk penyebaran pesan kepada audiens di luar wilayah asal penyiaran tersebut. Dalam konteks diplomasi publik, penyiaran internasional adalah salah satu instrumen utama untuk menyajikan perspektif, pandangan, dan nilai suatu negara kepada publik asing. Karena itu, penyiaran internasional menjadi salah satu komponen fundamental dalam pelaksanaan diplomasi publik suatu negara (O'Keeffe dan Oliver 2010).

Penyiaran internasional telah menjadi instrumen utama bagi negara untuk kepentingan pelaksanaan diplomasi publik. Banyak kegiatan diplomasi publik yang ditargetkan untuk kalangan tertentu, tetapi melalui penyiaran internasional, pemerintah berpeluang mencapai spektrum publik yang lebih luas. Saat ini, penyiaran internasional telah menjadi sumber utama urusan publik (*public affairs*) di dunia sehingga diharapkan dapat menghasilkan reputasi yang diinginkan oleh negara di mata opini publik internasional.

Efektivitas penggunaan penyiaran internasional dalam diplomasi publik menjadi perhatian pada tahun 1980 hingga 1990-an terkait keberhasilan konstruksi wacana tentang ancaman Uni Soviet oleh Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, melalui Radio Liberty dan Voice of America yang berhasil meningkatkan reputasi dan kedudukan Amerika

Serikat secara global (Permadi 2009). Hal tersebut kemudian membuat negara lain menyadari pentingnya peran instrumen penyiaran internasional guna mencapai kepentingan negara sehingga negara banyak berinvestasi dalam penyiaran internasional selama 30 tahun terakhir, khususnya pada penyiaran internasional *real time* yang dapat secara teratur mempromosikan budaya, ide dan pemberitaan sesuai dengan agenda negara. Dalam konteks krisis diplomatik Qatar, hal ini menjadi salah satu upaya yang ditempuh oleh Sheikh Hamad melalui pendirian jaringan penyiaran Al-Jazeera pada tahun 1996.

Selain dimensi komunikasi publik dan penyiaran internasional, masalah krisis internasional juga penting untuk dijelaskan. Krisis internasional merupakan sebuah situasi di mana pola interaksi antar negara berubah secara signifikan (Holsti 1972:250). Snyder-Diesing (1977:6-7) mengatakan krisis internasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi antara dua atau lebih pemerintahan berkuasa dalam konflik atau perang singkat, tetapi melibatkan persepsi peperangan dengan probabilitas tinggi dan membahayakan.

Dalam hubungan internasional, krisis yang terjadi terkait dengan situasi yang menyebabkan pertentangan antar negara atau tantangan terhadap dominasi satu aktor dalam sistem internasional (Holsti 1972). Ketika terjadi krisis tersebut, terlihat adanya perubahan mendadak secara signifikan dalam intensitas maupun kapasitas interaksi antar negara yang terlibat. Dalam mengkaji masalah krisis internasional, Phillips dan Rimkunas (1978) menyebutkan terdapat dua pendekatan untuk memahami krisis internasional. Pertama, krisis internasional dipahami melalui pendekatan substantif, yakni ketika krisis dikaji menggunakan konsep atau teori krisis khusus. Kedua, krisis dipahami melalui pendekatan umum, yakni ketika krisis ditinjau melalui satu atau seluruh aktor yang beraktivitas selama krisis yang dikaji secara kronologis.

### **Krisis Diplomatik Qatar**

Rivalitas dan ketegangan hubungan antara negara-negara di Timur Tengah bukan hal baru. Perkembangan politik, ekonomi dan peperangan di beberapa negara Timur Tengah telah membuat krisis politik menjadi lebih kompleks. Pada 5 Juni 2017, misalnya, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan memblokir jalur darat, udara dan laut Qatar. Hal ini berdampak cukup besar bagi Qatar mengingat hampir 80% kebutuhan makanannya diimpor melalui Teluk Persia. Qatar tidak dapat leluasa melakukan impor

mengingat jalur tersebut dikuasai Arab Saudi sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Qatar. Qatar sendiri hanya memproduksi 1% dari kebutuhan produk pangan dalam negeri mereka (Taylor 2017).

Selain itu, blokade udara menyebabkan seluruh maskapai penerbangan dari dan menuju Qatar ditangguhkan. Emirates menjadi maskapai pertama yang mengeluarkan pernyataan penangguhan penerbangan ke Qatar, kemudian diikuti oleh maskapai lain seperti Etihad Airlines dan Saudia Airlines. Qatar Airways pun kemudian menangguhkan penerbangan ke Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain sebagai respons balasan blokade itu. Hal ini menjadikan penerbangan dari dan menuju Qatar dari Afrika atau Eropa dialihkan rutenya melalui Iran sehingga Qatar harus lebih banyak membayar biaya penerbangan. Hal ini berdampak pada penurunan angka kedatangan turis secara drastis pada tahun pertama krisis, di mana angka turis dari negara anggota Dewan Kerjasama untuk negara Arab di Teluk (*the Gulf Cooperation Council/GCC*) adalah yang terbesar di Qatar (Qatar Tourism Authority 2017). Bersamaan dengan pemutusan hubungan diplomatik tersebut, warga negara Qatar yang tinggal di Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UEA diberikan waktu selambat-lambatnya dua minggu untuk kembali ke Qatar, dan begitu pun sebaliknya. Selain itu, Arab Quartet juga menarik seluruh modal mereka dari Qatar National Bank (QNB). Penarikan modal negara berdampak pada penurunan nilai deposit imigran hingga \$12.8 miliar.

Banyak analisis memandang kedekatan Qatar dengan Iran sebagai penyebab utama terjadinya krisis diplomatik ini. Iran dianggap sebagai negara yang mengancam keamanan Timur Tengah, bahkan dunia. Selama bertahun-tahun, Qatar terlihat menjaga hubungan baiknya dengan Iran. Hal ini salah satunya terlihat dari penolakan Qatar dalam Joint Comprehensive Plan of Action (Kesepakatan Nuklir Iran) oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015. Selain itu, pada pemilihan presiden Iran tahun 2017, Sheikh Hamad, pemimpin Qatar, turut pula memberi selamat kepada Hassan Rouhani yang terpilih kembali atas kemenangannya sebagai presiden Iran.. Namun, puncak dari kemarahan Arab Quartet sebetulnya diakibatkan oleh pemerintah Qatar yang mengesahkan pembayaran \$700 juta untuk kelompok Hizbullah, partai politik dan milisi Syiah yang didukung Iran di Irak, sebagai imbalan atas kebebasan anggota keluarga kerajaan Qatar yang ditawan di Irak pada April 2017 (Gordon, *et al*:2017) Selain itu, faktor dukungan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dalam KTT Riyadh pada Mei 2017 memberikan keberanian bagi Arab Saudi dalam memerangi negara dan kelompok yang bersekutu dengan Iran dan Ikhwanul Muslimin.

Pemerintah negara-negara selain anggota GCC cenderung bersikap netral dan mendukung adanya dialog di antara negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Meskipun begitu, publik internasional memiliki reaksi yang berbeda. Publik internasional bersikap lebih ofensif dalam merespons krisis ini. Respons publik yang pro-Arab Quartet dapat terlihat dari banyaknya demonstrasi di berbagai kota di dunia. Salah satunya adalah demonstrasi di Zurich pada Juni 2017 yang menuntut penggantian tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022 karena Qatar dianggap mengabaikan keamanan turis dan atlet. Demonstrasi juga terjadi pada Juli 2018 di London, dan yang terkini, demonstrasi anti-Qatar di Kantor PBB, New York, yang menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk memberi sanksi atas Qatar karena dukungan negara itu terhadap terorisme (Embury-Dennis 2019).

Respons ini tak dapat dipungkiri merupakan dampak dari propaganda yang dilakukan oleh Arab Quartet untuk mempengaruhi opini publik kepada Qatar, khususnya terkait isu terorisme. Di media sosial, hingga memasuki tahun kedua, situs dan akun Twitter *The Qatar Insider* yang muncul di awal krisis masih aktif menampilkan pemberitaan yang menginformasikan dukungan Qatar terhadap aktivitas terorisme di berbagai belahan dunia. Akun ini masih mendapat perhatian publik yang besar dengan rata-rata *engagement* sebanyak 24.000 pengguna (Vogel 2019). Selain melalui media sosial, berbagai konferensi anti-Qatar juga diselenggarakan seperti konferensi oleh TRENDS Research & Advisory Centre di Paris dan konferensi “Qatar, Global Security & Stability Conference” yang dicetuskan oleh Khalid al-Hail, seorang reformis pendiri Qatar National Democratic Party dengan dukungan parlemen Inggris di Hotel Intercontinental, London pada September 2017 (“London Conference Hosts Qatari Opposition, Discusses Doha’s Terror Funding”).

### **Jaringan Penyiaran Al-Jazeera**

Dalam menghadapi krisis diplomatik pada 2017 tersebut, Qatar membangun diplomasi publik melalui jaringan penyiaran Al-Jazeera yang dimilikinya. Sebagai salah satu jaringan penyiaran di dunia, Al-Jazeera telah melakukan ekspansi penyiaran sejak didirikan tahun 1996. Al-Jazeera yang bermula dari stasiun televisi telah berkembang pesat. Terdapat beberapa jenis penyiaran untuk menjangkau khalayak lebih luas yang dilakukan oleh Al-Jazeera. Jenis-jenis penyiaran Al-Jazeera tersebut adalah televisi, *audio broadcasting* dan internet.

Al-Jazeera mengawali program penyiaran internasionalnya melalui saluran televisi pada tahun 1996 dan menayangkan siaran 24 jam pertamanya pada 1 Januari 1999. Pada awalnya, Al-Jazeera hanya fokus menyajikan berita Dunia Arab, namun kemudian Al-Jazeera memperluas jaringannya dengan saluran TV berbagai bahasa di beberapa negara lain.

Al-Jazeera kemudian melakukan ekspansi dengan membuka berbagai saluran baru seperti Al-Jazeera Mubasher yang hadir sebagai saluran berita *real time* 24 jam pertama di Timur Tengah. Setahun kemudian, Al-Jazeera English (AJE) diluncurkan sebagai saluran berita berbahasa Inggris pertama yang berpusat di Timur Tengah dengan slogan “*Setting the News Agenda. Every Story, Every side. Hear the Human Story*” dengan stasiun pusat di Doha, London dan Washington D.C. Kemunculan AJE ini kemudian mendorong Al-Jazeera menambah saluran lain seperti Al-Jazeera America, Al-Jazeera Turk, Al-Jazeera Balkans, Al-Jazeera Plus (AJ+) dan Al-Jazeera Documentary.

Al-Jazeera English meluncurkan program-program selain berita yang banyak mendapat perhatian seperti debat, dokumenter, diskusi bisnis, teknologi, hingga olahraga. Di antara program-program ini, program dokumenter dan diskusi berhasil meraih audiens paling banyak dari seluruh audiens Al-Jazeera. Program-program ini dianggap telah mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat Arab hingga masyarakat global (Samuel-Azran 2013). Program-program yang terkenal termasuk *People & Power* (program dokumenter tiap pekan yang menginvestigasi penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan) dan *Inside Story* (program investigasi yang mengupas secara mendalam isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan).

Selain televisi, Al-Jazeera juga meluncurkan *audio broadcasting* berupa program radio digital yang dapat diakses melalui [listen.aljazeera.com](http://listen.aljazeera.com) dan [www.aljazeera.com/podcasts](http://www.aljazeera.com/podcasts) dalam berbagai bahasa dan saluran *podcast* di aplikasi Spotify dengan nama *Al-Jazeera-Your World*.

Selanjutnya, Al-Jazeera juga merambah ke dunia digital internet. Al-Jazeera memiliki beberapa situs resmi. Melalui situs-situs ini, seluruh berita dan program di seluruh saluran dalam Al-Jazeera dapat diakses seperti situs resmi Al-Jazeera [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), situs berbahasa Bosnia/Kroasia/Serbia [balkans.aljazeera.com](http://balkans.aljazeera.com), situs berbahasa Arab untuk isu politik tanpa sensor maupun *editing* dalam [mubasher.aljazeera.net](http://mubasher.aljazeera.net), dan situs AJ+ melalui [www.ajplus.net](http://www.ajplus.net) yang dapat diakses dalam bahasa Inggris, Spanyol, Arab dan Prancis. Setiap saluran Al-Jazeera juga memiliki akun media sosial di Twitter, Instagram dan YouTube seperti

akun @aljazeera dengan liputan berbahasa Arab, @aljazeeraenglish dalam bahasa Inggris, @aljazeera documentary untuk penayangan dan promosi program dokumenter, @aljazeera sports, dan @ajplus. Seluruh situs resmi dan media sosial Al-Jazeera tersebut selalu responsif dan memberikan informasi terkini kepada publik internasional.

### **Diplomasi Publik Qatar melalui Al-Jazeera**

Melalui jaringan penyiaran Al-Jazeera, Qatar melakukan diplomasi publik dalam merespon krisis diplomatiknya melawan Arab Quartet. Bagian ini menjelaskan bagaimana Qatar membangun tiga dimensi diplomasi publik melalui Al-Jazeera untuk menghadapi krisis diplomatik tersebut.

#### *Komunikasi Rutin*

Ketika krisis diplomatik terjadi, Al-Jazeera rutin menyiarkan respons terkini dari pemerintah Qatar dalam hitungan jam dan hari. Pada 5 Juni 2017, bertepatan dengan keputusan Arab Quartet untuk memutuskan hubungan diplomatik dan blokade dengan Qatar, Al-Jazeera menayangkan episode khusus dalam tayangan *Inside Story*. Episode tersebut mengupas krisis diplomatik yang baru saja terjadi dengan tiga narasumber: a) Abdulaziz Alhorr, akademisi dan peneliti, b) Mahjoob Zweiri, Associate Professor Sejarah Kontemporer Timur Tengah dari Qatar University, dan c) David Hearst, Pemimpin Redaksi *Middle East Eye*. Para narasumber tersebut menjelaskan bahwa krisis ini merupakan babak baru dari konflik di Timur Tengah karena pemutusan hubungan diplomatik disertai dengan blokade belum pernah terjadi sebelumnya. Al-Jazeera kemudian menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan pencetus awal terjadinya krisis ini. Arab Saudi melalui Saudi State News Agency mengimbuai seluruh negara dan perusahaan untuk melakukan hal yang sama, menghentikan berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan menciptakan instabilitas di wilayah Kawasan. Dalam episode tersebut, Al-Jazeera juga meliput pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar yang menyatakan bahwa alasan krisis ini tak berdasar dan bertujuan memaksa Qatar agar melaksanakan kebijakan sesuai kehendak negara lain, di mana hal tersebut melanggar kedaulatan Qatar sebagai negara merdeka.

Pada 6 Juni 2017, Al-Jazeera merilis artikel “How the World Reacted to the GCC Diplomatic Rift” (Bagaimana Dunia Bereaksi Terhadap Pemutusan Diplomatik Negara-negara Anggota GCC). Berita ini memberikan informasi terkait respons menteri luar negeri dan juru bicara

India, Turki, Pakistan dan Rusia terhadap krisis diplomatik Qatar. Dikatakan bahwa keempat negara tersebut bersikap netral dan tidak memiliki intensi untuk memutuskan atau menurunkan tingkat hubungan diplomatik negara mereka dengan Qatar. Apabila ditelaah kembali, terlihat bahwa negara-negara yang diliput pernyataannya oleh Al-Jazeera merupakan negara yang memiliki kedekatan hubungan dengan Qatar (“How the World Reacted to the GCC Diplomatic Rift”).

Pada 8 Juni 2017, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, menyampaikan pernyataannya melalui *Al-Jazeera Breaking* tentang konsekuensi ekonomi dari blokade Arab Quartet. Sheikh Mohammed mengatakan bahwa blokade tidak akan memiliki dampak besar terhadap ekonomi Qatar. Ia percaya bahwa kondisi ekonomi Qatar yang meski sebagian besar didasarkan pada ekspor minyak, saat ini telah diperkuat dengan diversifikasi ekonomi melalui investasi asing serta beragam industri dan bisnis yang tidak bergantung pada pasar Arab Quartet. Hal ini diharapkan membuat masyarakat tidak perlu khawatir atas blokade. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat Qatar dipastikan tidak akan kekurangan makanan dan bahan pokok lain. Melalui berita ini, disampaikan pula bahwa Qatar telah melakukan pembicaraan dengan Turki dan Iran untuk mengamankan pasokan makanan.

Kemudian, pada 10 Juni 2017, Al-Jazeera menuliskan berita dengan judul “Arab States Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf Crisis”, yang berisi 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar dalam 10 hari untuk normalisasi hubungan dengan Arab Quartet. Al-Jazeera menekankan bagaimana tuntutan ini merupakan tuntutan yang tak adil dan tak berdasarkan bukti konkret. Salah satu tuntutan yang dianggap tak logis adalah Arab Quartet menuntut pembayaran dengan jumlah yang tidak ditentukan sebagai kompensasi atas apa yang mereka klaim sebagai kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan luar negeri Qatar (“Arab States Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf Crisis”).

Sheikh Tamim menekankan bahwa Qatar akan menjadi pihak yang kooperatif dalam menghadapi krisis, namun intervensi urusan internal negara Qatar tidak dapat diterima sehingga Qatar tidak akan mengorbankan kedaulatan negara dengan melaksanakan ultimatum yang dilayangkan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa tanpa ultimatum tersebut, Qatar telah berkomitmen untuk memerangi terorisme dan menjelaskan tidak adanya afiliasi dengan ISIL, al-Qaeda dan organisasi yang dianggap teroris lainnya.

Kemudian, Al-Jazeera juga meliput bagaimana pemerintah Qatar memproses krisis diplomatik secara hukum dan bagaimana aspek kemanusiaan menjadi perhatian utama pemerintah Qatar (Barakat 2019).

Pada 11 Juni 2017, Qatar mengajukan gugatan melalui Josh Ashcroft -Jaksa Agung Amerika Serikat masa pemerintahan George W. Bush- dan firma hukumnya, untuk melawan tuduhan pendanaan terorisme terhadap Qatar oleh Presiden Donald Trump.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan tuduhan pendanaan terorisme oleh Qatar karena Hamas memiliki kantor perwakilan di Doha. Hamas sendiri digolongkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun klasifikasi ini tidak sesuai dengan negara-negara GCC. Menanggapi hal ini, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan tidak adanya dukungan moral dan finansial yang dilakukan oleh Qatar kepada organisasi terorisme manapun, termasuk Hamas, meskipun Hamas sendiri tidak dianggap sebagai organisasi teroris di Timur Tengah. Dalam pernyataan tersebut, Sheikh Mohammed juga mengatakan bahwa pemerintah Qatar akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina, namun hal tersebut hanya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Palestina, tidak dengan organisasi militan seperti Hamas.

Pada 13 Juni 2017, Al-Jazeera melalui tayangan *Inside Story* menayangkan episode berjudul "Qatar Priority 'to Address Siege's Humanitarian Impact'" (Prioritas Qatar Ditujukan terhadap Dampak Kemanusiaan Akibat Pengepungan). Ketika krisis diplomatik diumumkan, Arab Quartet memerintahkan warga negara Qatar yang berada di wilayah negaranya untuk segera kembali ke Qatar dalam jangka waktu 14 hari, dan sebaliknya. Amnesty International mengkritik langkah tersebut dan mengatakan bahwa Arab Quartet telah mempermainkan kehidupan ribuan orang dalam perselisihan politik. Hal ini menjadikan pemerintah Qatar fokus pada aspek kemanusiaan warga negaranya.

Tiga hari setelahnya, Al-Jazeera merilis artikel "Qatar Calls on UN to Protect Gulf Citizens' Rights" (Qatar Menyerukan PBB untuk Melindungi Hak-hak Warga Teluk) terkait pertemuan Rashid Khalikov, asisten sekretaris jenderal Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) PBB, dengan Ali bin Smaikh Al Marri, Kepala Qatar National Committee for Human Rights (QNHR). Keduanya berbicara tentang langkah Arab Quartet dalam mengklasifikasikan beberapa badan organisasi Qatar, termasuk Qatar Foundation (QF), yang dianggap sebagai tangan rezim Qatar yang terhubung dengan teror dan sarana jaringan Islamis internasional, meskipun tanpa adanya bukti yang konkret (Westrop 2017). Ali bin Smaikh Al Marri menyayangkan keputusan Arab Quartet yang melanggar hak-hak ribuan orang dengan memberlakukan pemutusan hubungan diplomatik dan blokade atas tuduhan tak berdasar kepada Qatar ini. Ia menekankan bahwa tuduhan kepada organisasi-organisasi Qatar

dimaksudkan untuk menghalangi bantuan kemanusiaan yang diberikan Qatar kepada negara yang membutuhkan dengan merusak reputasi organisasi tersebut. Karena itu, ia menyerukan tindakan segera oleh OCHA untuk menghentikan pelanggaran dan tuduhan yang tidak adil terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan Qatar. Melalui liputan ini, dikatakan pula bahwa sejak blokade terjadi pada 5 Juni 2017, ratusan pengaduan telah diajukan kepada QNHRC, dan QNHRC melaporkan adanya 13.000 individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia karena krisis. Mayoritas kasus merupakan tindakan pemisahan di antara anggota keluarga. Sebelumnya, pada 11 Juni 2017, Arab Saudi menyatakan sedang mempertimbangkan situasi keluarga yang terpisah karena krisis, di mana kemudian UEA, Bahrain dan Mesir menyatakan pernyataan serupa. Namun, hingga 6 hari kemudian, belum ada kelanjutan dari pernyataan tersebut, sehingga QNHRC meminta Arab Quartet untuk segera memberikan mekanisme lebih lanjut terkait pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi masyarakat.

Selanjutnya, Al-Jazeera menulis artikel “Qatar Presses UN to Take Action Against Blockade” (Qatar Mendesak PBB untuk Mengambil Tindakan Terhadap Blokade) pada 11 September 2017. Sebelumnya, Sheikh Mohammed menghadiri sesi UN Human Rights Council dan mengatakan bahwa blokade oleh Arab Quartet telah melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia sehingga PBB perlu mengambil tindakan terhadap blokade yang dipimpin Saudi tersebut. Sheikh Mohammed kemudian mengatakan bahwa sejak blokade terjadi hingga September 2017, tercatat peningkatan hingga 26.000 individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Sheikh Mohammed mengatakan bahwa Arab Quartet telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak sipil, ekonomi dan sosial, termasuk dalam melarang warga Qatar untuk bepergian ke wilayah mereka, dan sebaliknya. Larangan ini sendiri telah memisahkan banyak keluarga dan telah mengganggu pendidikan dan hak untuk bekerja di Qatar.

Dalam konteks komunikasi rutin ini, Al-Jazeera juga menjelaskan kebijakan domestik baru Qatar sebagai upaya revitalisasi ekonomi setelah terjadinya blokade. Al-Jazeera mengabarkan bagaimana Qatar mengembangkan industri domestiknya untuk menggantikan kebutuhan pokok yang biasanya didapat melalui impor dari atau melalui Arab Quartet. Pemerintah Qatar yang melaksanakan kebijakan larangan impor sejak blokade dikabarkan memberikan dana dan fasilitas kepada berbagai perusahaan pertanian dan peternakan sapi perah lokal untuk memproduksi produk tani dan susu guna memenuhi permintaan domestik Qatar. Pemerintah Qatar melalui QF juga mendorong pengembangan sumber

daya manusia dan membuka berbagai lapangan pekerjaan domestik bagi warga negara Qatar yang sebelumnya bekerja di negara yang melakukan blokade dan dideportasi, atau bagi masyarakat yang berada pada angkatan kerja lainnya. Qatar kemudian merespons penurunan investasi asing Arab Quartet di QNB dengan menggunakan penyuntikan likuiditas sebesar \$300 miliar dari Qatar Investment Authority (QIA). Qatar Airways pun yang defisit di awal blokade, karena penutupan 18 jalur penerbangan, berhasil membangun rute penerbangan baru. Pada bulan Maret 2017, Qatar Airways pun telah mengakuisisi 25% saham di Bandara Internasional Vnukovo Moskow, bandara terbesar ketiga Rusia (“Qatar Priority ‘To Address Siege’s Humanitarian Impact’”).

Selama bulan Juni dan September tahun 2017, Al-Jazeera meliput dan berdiskusi dengan berbagai pakar melalui programnya terkait respons pemerintah Qatar dan kebijakan domestik-luar negeri Qatar, serta memberikan rangkuman tiap pekan tentang situasi terbaru Krisis Diplomatik Qatar. Setiap rangkuman ini diunggah dengan judul “Qatar-Gulf Crisis: All the Latest Updates – Week 1” hingga “Qatar-Gulf Crisis: All the Latest Updates – Week 6” pada situs resmi Al-Jazeera.

### *Komunikasi Strategis*

Dalam upaya membentuk kemasam (*branding*) selama krisis, liputan-liputan Al-Jazeera menarasikan Qatar sebagai negara yang tangguh dan independen meski di masa krisis. Hal ini ditunjukkan melalui liputannya yang menginformasikan bahwa Qatar telah berhasil melewati berbagai dampak krisis yang menimpanya, di mana keberhasilan tersebut diraih, baik dari usaha pemerintah Qatar maupun dukungan negara lain kepada Qatar.

Melalui akun YouTube Al-Jazeera, diunggah beberapa video pada bulan Juni 2019 untuk memperingati dua tahun berjalannya blokade. Video pertama berjudul “What Do People in Qatar Think about the Blockade?” (Apa yang Orang Qatar Pikirkan tentang Blokade?) yang meraih hampir 200.000 penonton. Video tersebut berisi wawancara dengan beberapa warga negara dan imigran di Qatar. Saieed Haidan, misalnya, mengatakan ia berharap blokade terjadi sejak dahulu karena ia merasa perekonomian Qatar menjadi lebih baik sejak krisis terjadi. Mohammed Shurouq pun mengatakan pernyataan senada. Ia mengatakan bahwa krisis telah berpengaruh positif bagi negara Qatar karena telah memperkuat persatuan antara pemerintah Qatar dan masyarakat Qatar, di mana hal ini belum pernah terjadi sebaik ini.

Tak hanya warga negara Qatar, warga negara lain pun menyatakan hal serupa. Randa Ibrahim, warga Negara Jordania yang tinggal di Qatar, menyatakan bahwa sejak blokade, Qatar menjadi lebih mandiri di mana produk-produk impor seperti rempah, kopi dan susu saat ini dapat diproduksi di dalam negeri dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi. Meski begitu, melalui video ini, beberapa dari narasumber juga menyatakan harapan agar Arab Quartet segera berdamai dengan Qatar sebagaimana seharusnya negara-negara Islam ini bersatu seperti sediakala.

Pada hari yang sama, dirilis artikel senada berjudul “Qatar ‘Stronger, United’ Two Years After Blockade” (Qatar Lebih Kuat, Bersatu, Dua Tahun Setelah Blokade) oleh Saba Aziz. Artikel ini menginformasikan bagaimana pendapat masyarakat Qatar selama krisis terjadi. Sepuluh narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk juga ekspatriat di Qatar yang berasal dari Filipina, India, Kolombia, Inggris dan Maroko, menyatakan pernyataan sama bahwa blokade yang diberlakukan oleh Arab Quartet telah menjadikan Qatar lebih kuat dan bersatu. Romeo Ezekiel, seorang murid dari Filipina, memberikan selamat kepada Pemerintah Qatar karena mampu menyediakan kebutuhan pangan nasional dan mendapat solusi jangka panjang atas blokade yang terjadi. Dengan hal ini, ia menganggap bahwa Qatar telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak perlu bantuan Arab Saudi untuk menjadi negara yang sukses dan maju. Akkash Ahmed, seorang ekspatriat asal Pakistan, menyatakan bahwa ia cukup terkejut Qatar dapat menghadapi krisis dengan sangat baik mengingat Qatar dikenal sebagai negara Timur Tengah yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Blokade ini, menurutnya, telah memberi peluang bagi industri lokal untuk berperan besar dalam perekonomian Qatar sehingga Qatar tidak bergantung kepada negara lain. Artikel tersebut juga menginformasikan adanya peningkatan rasa patriotisme dan nasionalisme sejak krisis terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya berbagai karya seni seperti grafiti dan mural berupa bendera Qatar maupun ilustrasi Tamim Al-Majd di kota Doha (“Qatar ‘Stronger, United’ Two Years After Blockade”).

Kemudian, pada 5 November 2019, Al-Jazeera merilis liputan berita berjudul “Emir Says Qatar has Overcome Obstacles of Gulf Blockade” (Emir Mengatakan Bahwa Qatar Sudah Melewati Hambatan Blokade di Teluk). Dalam artikel ini, Sheikh Tamim menyatakan bahwa Qatar berhasil meraih target dalam bidang ekonomi pada *Qatar National Vision 2030* selama krisis. Ia mengatakan bahwa Qatar mendapatkan surplus anggaran hingga \$1,1 miliar pada tahun 2019 setelah diperkirakan akan mengalami defisit pada 2018. Pada Mei 2018, QNB juga melaporkan surplus Qatar yang meningkat menjadi 6,4% dari Produk Domestik Bruto pada kuartal

keempat (“Emir Says Qatar has Overcome Obstacles of Gulf Blockade”). Sheikh Tamim juga mengatakan pencapaian target *Qatar National Vision 2030* dalam pertumbuhan ekonomi Qatar dapat terlihat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pangan, perikanan dan pertanian melalui berbagai program yang dicanangkan oleh negara untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan produksi nasional selama tiga tahun terakhir.

Dalam dimensi komunikasi strategis ini, Al-Jazeera juga melakukan investigasi terhadap propaganda Arab Quartet sebagai bagian dari kampanye politik Qatar. Investigasi tersebut, misalnya, dilakukan melalui artikel “British MP received \$20,700 for anti-Qatar conference” yang membuka fakta terkait pelaksanaan konferensi Anti-Qatar di London. Al-Jazeera mengungkap bahwa Daniel Kawczynski, anggota parlemen Shrewsbury & Atcham Inggris, dibayar 15.000 poundsterling (sekitar 300 juta rupiah) untuk membantu pelaksanaan konferensi tersebut. Konferensi anti-Qatar ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan dukungan kudeta pemerintahan Sheikh di Qatar. Hal ini dikarenakan salah satu pencetus konferensi ini ialah Khalid al-Hail, pendiri Qatar National Democratic Party, yang telah dikenal berupaya melakukan perubahan rezim di Qatar sejak tahun 2014 (“Qatari Opposition Khalid Al-Hail Moves to London and Negotiates to Join a Libyan TV Channel”). Investigasi Al-Jazeera pun mengatakan bahwa kemungkinan besar Arab Saudi dan UEA turut mengucurkan pendanaan tersebut (“British MP received \$20,700 for anti-Qatar conference”).

Investigasi selanjutnya terkait demonstrasi anti-Qatar dalam artikel “Anti-Qatar Protesters in New York Were Paid: Report”. Investigasi Al-Jazeera menyatakan bahwa Nezha Tagmouti telah mengumpulkan massa melalui Facebook pada September 2017 untuk melakukan demo bertema “perdamaian dunia”. Pada hari yang telah ditentukan, massa kemudian diberikan uang \$100 (sekitar Rp1.439.000) dan bendera anti-Qatar. Nezha Tagmouti juga dikatakan telah mengkoordinasi aktivitas anti-Qatar lainnya termasuk demonstrasi anti-Qatar di Hamburg, konferensi jurnalis anti-Qatar di Munich, juga konferensi anti-Qatar di London pada Juli 2018.

Sebelumnya, Al-Jazeera telah meliput investigasi demonstrasi anti-Qatar di London pada 23 Juli 2018. Demonstrasi tersebut bertepatan dengan kunjungan Sheikh Tamim pada Perdana Menteri Inggris, Theresa May. Investigasi mengungkapkan bahwa Extra People, sebuah agen *casting* di Inggris, menawarkan \$25 (sekitar Rp 400.000) melalui surel untuk setiap partisipan demonstrasi di jalan Downing selama kunjungan Sheikh Tamim. Meski tidak dikatakan siapa yang memberi instruksi kepada Nezha Tagmouti dan agen *casting* tersebut, seluruh demonstrasi anti-Qatar

telah diberitakan secara masif oleh media milik Arab Saudi seperti Arab News dan Al Hayat serta media milik UEA seperti Emirates News Agency.

Selanjutnya, Al-Jazeera melakukan investigasi penggunaan sosial media sebagai alat propaganda Arab Quartet melalui artikel “Twitter Bots, Fake News and Propaganda in the Qatar Crisis” yang menjelaskan kerentanan sosial media untuk dimanipulasi dengan tujuan propaganda negara. Akun-akun bodong di sosial media Twitter ini diprogram untuk dapat berinteraksi termasuk menulis *tweet* (cuitan), mengirim pesan pribadi serta melakukan *retweet* yang bertujuan mempromosikan suatu isu agar dapat menjadi *trending* di seluruh dunia, di mana akun-akun ini diprogram melalui sebuah *software*. Al-Jazeera bekerja sama dengan Marc Jones, peneliti dari University of Exeter, melakukan riset yang menghasilkan bahwa terdapat jumlah akun bodong yang sangat besar di Arab Saudi, di mana akun-akun ini dapat menuliskan *tweet* hingga 100.000 tiap hari. Pengaruh yang ditimbulkan atas banyaknya *tweet* yang dapat menjadi *trending* ialah membawa suatu isu menjadi lebih penting daripada yang lainnya, di mana akun-akun ini menyebarkan pesan terkait aktivitas Sheikh Hamad yang diasumsikan mendukung terorisme (“Twitter Bots, Fake News and Propaganda in the Qatar Crisis”).

Kemudian, Al-Jazeera pun berperan dalam meliput berbagai perkembangan aspek budaya dan objek wisata Qatar selama krisis, sebagaimana tercantum dalam *Qatar National Vision 2030*, di mana seni budaya dan pariwisata termasuk salah satu sektor utama yang dikembangkan oleh Qatar (“Qatar Looks to Increase Tourism Despite Blockade”). Salah satunya yakni melalui liputan ilustrasi Sheikh Hamad yang viral sebagai wujud dukungan masyarakat Qatar terhadap kepemimpinan Sheikh Tamim yang disebut “Tamim the Glorious” atau “Tamim al-Majd” yang dibuat oleh seniman ternama Qatar, Ahmed bin Majed Almaadheed (Gambar 1).

Ilustrasi Tamim al-Majd dicetak di berbagai sudut kota Doha dan dijual menjadi stiker, alat makan dan pakaian di pasar Souq Waqif. Tamim al-Majd juga dilukis di pesawat Boeing 787-7 Qatar Airways yang digunakan untuk pengangkutan barang dari negara mitra Qatar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Qatar. Dikabarkan oleh Al-Jazeera pula bahwa sejumlah besar masyarakat Qatar mengganti foto profil mereka di berbagai platform media sosial sebagai bentuk nasionalisme mereka. Dikabarkan bahwa siang dan malam masyarakat datang untuk menandatangani ilustrasi di berbagai lokasi Tamim Al-Majd dalam rangka wujud menunjukkan kesetiaan dan cinta masyarakat pada pemerintah Qatar, utamanya di *Walls of Solidarity* di kawasan Al-Gharafa, Doha (“Glorious Tamim: ‘You Won and You Were Silent’”).

Gambar 1

*Tamim al-Majid pada Walls of Solidarity* (Cajsa Wikstrom/Aljazeera 2017)



Dalam kampanye budaya selanjutnya, Al-Jazeera melalui program dokumenter *Viewfinder* meliput film pendek oleh Amal Al Muftah, sutradara film asal Qatar yang berjudul *House of (GCC) Cards*. Al Muftah menyatakan dirinya membuat film ini untuk fungsi edukasi dalam meningkatkan kesadaran kepada publik akan isu politik yang terjadi di antara negara GCC, di mana ia membahas bagaimana rivalitas dan perbedaan pendapat di antara negara GCC dapat mengakibatkan krisis diplomatik yang ia sebut sebagai krisis terbesar dalam sejarah modern Timur Tengah.

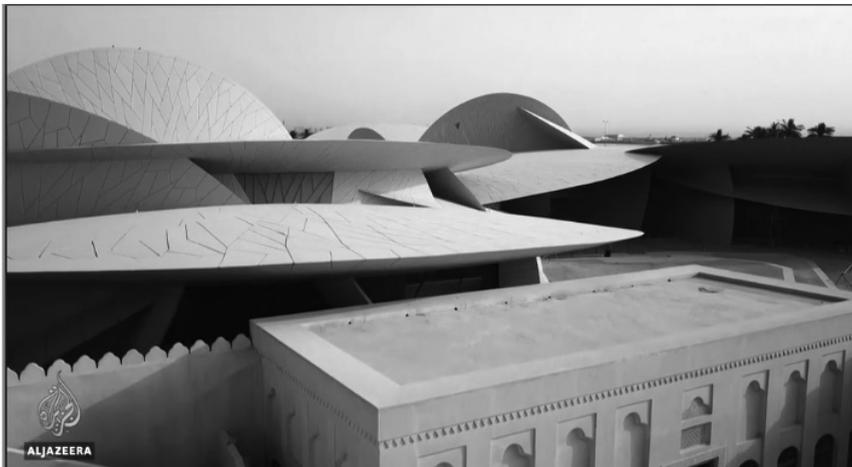
Al-Jazeera juga meliput film *Shelli Yeseer?* oleh Ghanem Al Sulaiti, aktor dan sutradara ternama Qatar yang mengangkat kisah masyarakat Qatar yang mengalami perpisahan anggota dari 11.000 keluarga karena terdiri dari pasangan warga negara campuran antara Qatar dengan keempat negara yang melakukan blokade. Sulaiti mengatakan tak takut akan kontroversi dan dirinya hanya mencoba mengangkat film dari fakta dan nilai kemanusiaan dalam realita kehidupan masyarakat Qatar. *Shelli Yeseer?* merupakan salah satu dari 16 film yang diputar di Qatar National Theater pada tahun 2018.

Kemudian, dalam mendukung sektor pariwisata, Al-Jazeera menginformasikan pelaksanaan upacara pembukaan Qatar National Library oleh Qatar Foundation. Pembukaan Qatar National Library dilakukan sebagai upaya pemerintah Qatar untuk menjadikan Qatar sebagai Education City. Dalam upacara pembukaan ini, diundang Tom Brady, pemain National Football League (NFL) ternama yang telah ditunjuk

sebagai *Best Buddies Global Ambassador*.

Lalu, pada 27 Maret 2019, Al-Jazeera merilis artikel dan video berjudul “Qatar National Museum Set to Open Its Doors to The Public” yang menginformasikan pembukaan Museum Nasional Qatar yang dirancang oleh Jean Nouvel, arsitek Prancis pemenang Pritzker (Gambar 2). Museum Nasional Qatar yang terletak di seberang Doha Corniche, pusat kawasan pejalan kaki di Qatar, diharapkan dapat menjadi tempat wisata bagi turis mancanegara (“Qatar National Museum Set to Open Its Doors to The Public”).

Gambar 2  
Qatar National Museum (Al-Jazeera 2019)



Sheikha al-Mayassa Al-Thani, kepala Otoritas Qatar National Museum, mengatakan museum ini merupakan simbol budaya dan tradisi Qatar yang diharapkan dapat menghubungkan masyarakat internasional dari berbagai latar belakang untuk lebih mengenal Qatar. Museum Nasional Qatar didesain dengan 11 galeri yang menceritakan sejarah Qatar melalui film-film pendek yang diproduksi oleh Doha Film Institute. Salah satu film pendek yang diputar menceritakan pencapaian Qatar di bawah kepemimpinan Sheikh Tamim yang digambarkan melalui perkembangan ekonomi negara Qatar yang bermula dari sektor perikanan dan penjualan mutiara hingga menjadi negara dengan cadangan gas alam terbesar ketiga dan eksportir gas alam terbesar kedua di dunia. Museum Nasional Qatar juga menunjukkan perkembangan budaya dan ekonomi Qatar melalui penunyan kain Sadu, serta perkembangan komoditas kopi tradisional

Qatar yang disebut *Qahwa* atau *Gahwa* (“Qatar National Museum Set to Open Its Doors to The Public”).

### *Komunikasi Jangka Panjang*

Dalam dimensi komunikasi jangka panjang, Al-Jazeera berperan sebagai penyiaran internasional yang menginformasikan pelaksanaan konferensi *counter-terrorism* berskala internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Qatar. Contohnya adalah penyelenggaraan *Regional Dialogue on Sustaining Peace* di Doha, Qatar pada 18-19 Januari 2018, sebagai upaya untuk mengupayakan cara-cara damai untuk menyelesaikan krisis di Teluk dan menjabarkan upaya Qatar melawan aktivitas terorisme di kawasan Timur Tengah dan dunia global.

Selain itu, Al-Jazeera menyiarkan Doha Forum, yakni wadah diskusi global bagi pembuat kebijakan, peneliti, ahli dan masyarakat yang memiliki kepedulian dan ingin berkontribusi secara nyata terhadap isu dan peristiwa terkini, di mana Al-Jazeera merupakan mitra penyiaran resmi yang ditunjuk oleh Lulwah Al Khater, Direktur Utama Doha Forum. Doha Forum yang dilaksanakan setiap tahun, pada pelaksanaannya tahun 2018 dan 2019, membahas krisis diplomatik Qatar secara khusus dalam agenda diskusi panelnya.

Selanjutnya, Al-Jazeera juga meliput konferensi oleh QNHRC, komisi hak asasi manusia yang dibentuk oleh Pemerintah Qatar. Sejak tahun 2017, QNHRC menciptakan gerakan melalui konferensi-konferensi dengan mitranya yang diprakarsai oleh Ketua QNHRC, Ali bin Samikh al-Marri, dengan tujuan memobilisasi komunitas internasional melawan ilegalitas blokade yang dilakukan oleh Arab Quartet (Cherkaoui, wawancara pribadi, 16 Maret 2020). QNHRC juga melaksanakan konferensi-konferensi untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia oleh Arab Quartet atas penangkapan jurnalis maupun aktivis seperti Nawaf Talal Rashid pada Mei 2018.

Al-Jazeera juga menginformasikan kepada publik internasional terkait program beasiswa dan pertukaran pelajar oleh Pemerintah Qatar melalui QF (Qatar Foundation), lembaga non-profit untuk mengembangkan Qatar menjadi negara maju di bidang pendidikan, riset, sains dan teknologi, seni, dan pembangunan masyarakat. QF memiliki program beasiswa dan pertukaran pelajar bagi siswa di seluruh dunia untuk belajar di Education City, yakni kawasan khusus pendidikan di kota Al Rayyan, Qatar, sebagai upaya Qatar untuk menjadi pusat pendidikan di Timur Tengah yang dibuka oleh Sheikh Hamad pada tahun 2003. Jenjang pendidikan di Education City

terdiri dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Education City saat ini memiliki enam cabang universitas dari Amerika Serikat seperti Carnegie Mellon University in Qatar (CMU-Q) dan Georgetown University in Qatar (GU-Q), satu universitas asal Prancis, HEC Paris in Qatar, dan satu universitas lokal, Hamad Bin Khalifa University.

Al-Jazeera sendiri telah menjadi media yang cukup banyak meliput kisah penerima beasiswa QF, baik melalui artikel, program diskusi maupun dokumenter Al-Jazeera sejak pendiriannya, termasuk pada tahun 2017 hingga 2019. Salah satu artikel dari Al-Jazeera pada tahun 2017 ialah membahas tentang Ahmed Mohamed, seorang siswa Muslim di Texas, Amerika Serikat, yang ditangkap pada tahun 2015 karena jam buatannya yang dikira sebagai bom. Mohamed menerima tawaran dari QF untuk belajar dalam *Young Innovators Programme* dan menerima beasiswa penuh hingga jenjang sarjana. QF melalui Al-Jazeera menyatakan bahwa Mohamed adalah sosok yang tepat untuk mengikuti *Young Innovators Programme* yang diperuntukkan bagi insan muda dalam berinovasi dan mengeksplorasi kreativitasnya. Mohamed juga menyatakan bahwa dirinya tak ragu untuk bergabung dengan program ini setelah melihat fasilitas serta kompetensi sekolah dan universitas di bawah QF (“Story about Ahmed the Clockmaker in Qatar”).

Terakhir, dalam dimensi komunikasi jangka panjang ini, Al-Jazeera memiliki institusi pendidikan dalam bidang komunikasi, yakni Al-Jazeera Media Institute (AJMI) yang melaksanakan komunikasi jangka panjang dengan memberi akses kepada jurnalis atau peneliti dari berbagai negara melalui pelatihan dan beasiswa yang diadakan setiap tahun. Hal ini sesuai dengan nilai AJMI, di mana seluruh peserta pelatihan dan beasiswa memiliki hak penuh untuk mengakses informasi serta mengetahui proses pengambilan keputusan dalam Al-Jazeera. Ahli-ahli yang melaksanakan pelatihan di AJMI pun merupakan presenter, produser dan jurnalis senior Al-Jazeera, dan ahli dari Departemen Informasi dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri Qatar (Ali Younes, wawancara pribadi, 13 Maret 2020).

AJMI juga telah bekerja sama dengan institusi dan lembaga media terkemuka seperti Thomson Foundation, lembaga pengembangan media berbasis di London, sejak tahun 2004. Thomson Foundation membantu mengembangkan program pelatihan bagi jurnalis dan produser di AJMI dalam pelatihan utama seperti teknik jurnalisisme investigasi dan liputan khusus peristiwa luar biasa. Kemudian, AJMI juga bekerja sama dengan Actualités de l’Académie atau France International Media Academy (FIMA), sebuah institusi pelatihan media Prancis yang fokus kepada pengembangan teknologi penyiaran internasional. FIMA telah bekerja

sama dengan pemerintah Prancis, Uni Eropa, dan penyiaran internasional Prancis seperti CFI (Canal France International), yang merupakan badan pengembangan media yang didirikan oleh Ministry for Europe and Foreign Affairs pada tahun 1989, France 24 dan RFI (Radio France Internationale). Selama krisis diplomatik berlangsung, AJMI tetap melaksanakan pelatihannya meskipun peserta dari Arab Quartet yang pada tahun-tahun sebelumnya cukup mendominasi peserta dari kelompok jurnalis berbahasa Arab tidak dapat berpartisipasi atas larangan perjalanan menuju Qatar.

Dengan demikian, pemerintah Qatar sebetulnya sudah berupaya mengandalkan alat-alat *soft power* seperti diplomasi publik dan menggunakan komunikasi sebagai salah satu fokus terpenting dalam upaya melakukan manajemen krisis sejak tahun 2000-an (Nugraha, wawancara pribadi, 31 Maret 2020). Hal ini kemudian kembali diterapkan di tengah situasi krisis diplomatik di mana pemanfaatan Al-Jazeera sebagai alat diplomasi publik dinilai sangat strategis dalam upaya melawan dampak propaganda Arab Quartet (Antwi-Boateng 2013). Adanya ultimatum Arab Quartet untuk melakukan penutupan jaringan penyiaran Al-Jazeera menunjukkan posisi strategis keberadaan Al-Jazeera sebagai instrumen diplomasi publik Qatar kepada publik internasional sehingga dianggap sebagai ancaman bagi Arab Quartet atas dasar rivalitas di tengah krisis.

## Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa Qatar menggunakan tiga dimensi komunikasi melalui jaringan penyiaran Al-Jazeera dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Quartet, yaitu komunikasi rutin, strategis dan jangka panjang. Dalam melaksanakan dimensi komunikasi rutin, pemerintah Qatar melalui Al-Jazeera memberikan jaminan pemberitaan rutin yang berimbang dan responsif dalam menjawab segala tuduhan yang diarahkan kepada Qatar sehingga Al-Jazeera memiliki urgensi sebagai pihak jawab dan pemberi klarifikasi. Dalam dimensi ini, pemerintah Qatar melalui Al-Jazeera juga menginformasikan kebijakan-kebijakan Qatar, baik domestik maupun luar negeri, yang menunjukkan kompetensi pemerintah Qatar dalam mengatasi krisis, baik di dalam negeri maupun dalam menjalin kemitraan dengan negara lain. Selain itu, terlihat bahwa pemerintah Qatar merespons krisis secara damai sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Dalam dimensi komunikasi strategis, berbagai liputan Al-Jazeera digunakan pemerintah Qatar sebagai media untuk meningkatkan dan mengembalikan ketertarikan, pengetahuan, dan reputasi internasional dari

masyarakat global. Hal ini karena pemerintah Qatar yang telah melakukan upaya *branding* Qatar sejak tahun 1990-an melihat propaganda Arab Quartet menjatuhkan reputasi Qatar dalam opini publik internasional. Melalui dimensi komunikasi strategis ini, pemerintah Qatar pun berusaha membangun kembali *branding* tersebut.

Terakhir, dalam dimensi komunikasi jangka panjang, Qatar melalui berbagai kegiatan seperti Doha Forum, pertukaran pelajar dan beasiswa oleh QF, dan pelatihan dan beasiswa oleh AJMI telah berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama tentang Qatar dan masyarakatnya melalui *engagement* dengan individu-individu kunci dari berbagai negara yang diharapkan dapat lebih memahami pandangan dan posisi Qatar dalam krisis diplomatik Qatar. Hal ini dilakukan dalam rangka *branding* negara Qatar dalam kontribusinya terhadap isu-isu global dan kawasan sesuai dengan target Qatar sebagai negara terdepan dalam pendidikan sebagaimana dirancang dalam *Qatar National Vision 2030*.

## Referensi

- Al-Muftah, Hamad. 2019. "Qatar's Response to the Crisis: Public Diplomacy as a Means of Crisis Management". Hal. 233-250 dalam Andreas Krieg (ed.), *Divided Gulf: The Anatomy of a Crisis*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- "Anti-Qatar Protesters in New York Were Paid: Report". Diakses pada 10 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2019/01/anti-qatar-protesters-york-paid-report-190129075831120.html>)
- Antwi-Boateng, Osman. 2013. "The Rise of Qatar as a Soft Power and the Challenges," *European Scientific Journal*, 9 (10): 39-51.
- "Arab States Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf Crisis". Diakses pada 10 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>)
- Barakat, Sultan. 2019. "Priority and Challenges of Qatar's Humanitarian Diplomacy," *Bergen: Chr. Miclesen Institute (CMI Brief no. 2019: 07)*.
- "British MP Received \$20,700 for Anti-Qatar Conference". Diakses pada 10 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2018/02/british-mp-received-20700-anti-qatar-conference-180211150423484.html>)
- Cherkaoui, Tarek. 2018. "Qatar's Public Diplomacy International

- Broadcasting, and the Gulf Crisis,” *Rising Powers Quarterly*, 3(3):127-149.
- Dozier, Kimberly. 2017. “Hillary’s Pals Made Ads for Saudis to Influence Trump”. Diakses pada 18 September 2019 dari (<https://www.thedailybeast.com/hillarys-pals-made-ads-for-saudis-to-influence-trump>)
- Embury-Dennis, Tom. 2019. “Qatar Claims its Victim of ‘Smear Campaign’ after Extras Allegedly Offered Money to Take Part in ‘Protest’ Against Country Outside UN Headquarters”. Diakses pada 1 Maret 2020 dari (<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/qatar-protest-un-new-york-extras-paid-actors-extras-headquarters-office-a8693146.html>)
- “Emir Says Qatar Has Overcome Obstacles of Gulf Blockade”. Diakses pada 29 Desember 2019 dari (<https://www.aljazeera.com/amp/news/2019/11/emir-qatar-overcome-obstacles-gulf-blockade-191105075057081.html>)
- “Glorious Tamim: ‘You Won and You Were Silent’”. Diakses pada 19 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/glorious-tamim-won-silent-170718093327234.html>)
- Gordon, Philip, Amos Yadlin dan Ari Heistein. 2017. *The Qatar Crisis: Causes, Implications, Risks, and the Need for Compromise*. Tel Aviv: The Institute for National Security Studies.
- Holsti, Ole R. 1972. *Crisis, Escalation, War*. Montreal and London: McGill-Queen’s University Press.
- “How the World Reacted to the GCC Diplomatic Rift”. Diakses pada 8 Januari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/world-reacted-gulf-diplomatic-rift-170605191418669.html>)
- Leonard, Mark, Conrad Smewing, dan Catherine Stead. 2002. *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- “London Conference Hosts Qatari Opposition, Discusses Doha’s Terror Funding”. Diakses pada 10 Pebruari 2020 dari (<http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/09/14/London-conference-hosting-Qatari-opposition-begins.html>)
- Nye, Joseph S. 2008. “Public Diplomacy and Soft Power”. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616 (1):94–109.

- O’Keeffe, Annmaree dan Alex Oliver. 2010. “International Broadcasting and its Contribution to Public Diplomacy”. Diakses pada 19 Agustus 2019 dari ([https://archive.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/O%27Keeffe\\_and\\_Oliver\\_International\\_broadcasting\\_WP\\_full\\_1.pdf](https://archive.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/O%27Keeffe_and_Oliver_International_broadcasting_WP_full_1.pdf))
- Permadi, Dedy. (2009). “Media Massa Sebagai Instrumen Diplomasi Amerika Serikat dalam Kasus Invasi ke Irak Dan Afganistan”. *Jurnal Ilmiah Scriptura*, 3(2).
- Phillips, Warren R. dan Richard Rimkunas. 1978. “The Concept of Crisis in International Politics”. Dalam *The Handbook of Political Behavior: Volume 2*. New York: Barnes & Noble.
- “Qatar Priority ‘To Address Siege’s Humanitarian Impact’”. Diakses pada 10 Desember 2019 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-priority-address-siege-humanitarian-impact-170612132400008.html>)
- “Qatar Hires Law Firm to Counter “Terrorism” Accusations”. Diakses pada 10 Desember 2019 dari (<https://www.aljazeera.com/video/news/2017/06/qatar-hires-law-firm-counter-terrorism-accusations-170611144120916.html>)
- “Qatar Presses UN to Take Action Against Blockade”. Diakses pada 2 Desember 2019 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/09/qatari-fm-doha-ready-dialogue-blockade-170911111044486.html>)
- “Qatar ‘Stronger, United’ One Year After Blockade”. Diakses pada 18 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2018/06/qatar-stronger-united-year-blockade-180603132928052.html>)
- “Qatar National Museum Set to Open Its Doors to the Public”. Diakses pada 10 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2019/03/qatar-national-museum-set-open-doors-public-190327121459855.html>)
- “Qatar Looks to Increase Tourism Despite Blockade”. Diakses pada 19 Pebruari 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/09/qatar-increase-tourism-blockade-170927145940777.html>)
- “Qatari Opposition Khalid Al-Hail Moves to London and Negotiates to Join a Libyan TV Channel”. Diakses pada 11 Pebruari 2020 dari (<https://www.raialyoum.com>)
- Samuel-Azran, Tal. 2013. “Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy,” *American Behavioral Scientist*, 57(9):1293-1311.

- Snyder, Glenn H. dan Paul Diesing. 1977. *Conflict Among Nations*. Princeton: Princeton Legacy Library.
- Stephens, Hampton. 2019. "Questioning the Reasons for U.S. Involvement in the Middle East". Diakses pada 20 September 2019 dari (<https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27262/questioning-the-reasons-for-u-s-involvement-in-the-middle-east>)
- "Story about Ahmed the Clockmaker in Qatar". Diakses pada 10 Maret 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2017/10/ahmed-mohamed-clockmaker-moving-qatar-study-usa-171020234841092.html>)
- Sulaeman, Dina Y. 2017. "Timur Tengah dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional". *JURNAL ICMES The Journal of Middle East Studies*, 1 (1).
- Taylor, Adam. 2017. "Qatar Could Face a Food Crisis in Spat with Arab Neighbors". Diakses pada 1 September 2019 dari (<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/05/qatar-could-face-a-food-crisis-in-spat-with-arab-neighbors/>)
- "Twitter Bots, Fake News and Propaganda in the Qatar Crisis". Diakses pada 10 Maret 2020 dari (<https://www.aljazeera.com/news/2018/6/4/twitter-bots-fake-news-and-propaganda-in-the-qatar-crisis>)
- Vogel, Kenneth P. 2019. "How a Trump Ally Tested the Boundaries of Washington's Influence Game". Diakses pada 10 Agustus 2019 dari (<https://www.nytimes.com/2019/08/13/us/politics/elliott-broidy-trump.html>)
- Westrop, Sam. 2017. "Qatar Foundation Using University Grants to Fund Radical Individuals". Diakses pada 17 Pebruari 2020 dari (<http://www.theportal-center.com/2019/05/qatar-foundation-using-university-grants-to-fund-radical-individuals/>)
- Wood, Josh. 2018. "How a diplomatic crisis among Gulf nations led to a fake news campaign in the United States". Diakses pada 25 Juli 2019 dari (<https://www.pri.org/stories/2018-07-24/how-diplomatic-crisis-among-gulf-nations-led-fake-news-campaign-united-states>)

## **Wawancara**

- Cherkaoui, wawancara pribadi, 16 Maret 2020.
- Ali Younes, wawancara pribadi, 13 Maret 2020.
- Nugraha, wawancara pribadi, 31 Maret 2020.